



**PROVISIONAL GOVERNMENT
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA
PERDANA MENTERI**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 01/SK/PM/PROV-GOV/X/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KEPALA PEMERINTAHAN WILAYAH**

Atas nama moyang bangsa Papua, atas nama segenap komunitas makhluk, atas nama tulang-belulang dan atas nama anak-cucu yang akan datang, Perdana Menteri Provisional Government of West Papua dengan memanjatkan syukur bagi YAHWEH ELOHIM, Pencipta dan Tuhan alam semesta, tanah dan bangsa Papua.

Menimbang:

- a. bahwa setiap makhluk manusia dan komunitas makhluk lain secara pribadi dan kelompok berhak untuk hidup bebas dan merdeka dari segala bentuk dan jenis penjajahan dan ketidak-adilan kapan pun, di manapun, oleh siapapun dan dengan alasan apapun;
- b. bahwa bangsa Papua secara konstitusional dan sah telah mengumumkan Provisional Government of West Papua sebagai Pemerintah United Liberation Movement for West Papua untuk berpemerintahan sendiri secara berdaulat secara politik dan hukum pada tanggal 1 Desember 2020.
- c. bahwa Provisional Government telah mengakomodir semua peristiwa hukum dan politik sebagai landasan konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara United Liberation Movement for West Papua yang telah di tetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) United Liberation Movement for West Papua pada 28 November 2020.
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut, maka aktivitas Provisional Government harus berlangsung di seluruh wilayah Pemerintahan mulai dari Mamta, Anim-Ha, La-Pago, Mee-Pago, Saireri, Bomberay, sampai Domberay dalam rangka mempersiapkan pengambil-alihan kekuasaan pemerintahan.

Memperhatikan:

1. Dinamika politik dan diplomasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang telah mendapatkan dukungan regional Melanesia, Pacific Island Forum (PIF) dan Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) dan dukungan internasional Pemerintah Inggris, Pemerintah Belanda, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations).
2. Hasil sidang tahunan Komite Legislatif ULMWP dan hasil sidang KTT-LB ULMWP tentang upgrade status hukum dan politik United Liberation Movement for West Papua dari sebuah organisasi perjuangan menjadi Pemerintah Sementara.
3. Pembentukan Departemen dan Pengangkatan Menteri pada 1 Mei 2021.

Mengingat:

1. Manifesto politik kemerdekaan Papua 19 Oktober 1961 di Hollandia (sekarang Provinsi Papua).
2. Bab III pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
3. Pasal II ayat 7, 12, Bab VIII Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP.
4. Pasal XIV Pasal 17 ayat 7, 9 Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP.
5. Manifesto politik 19 Oktober 1961 Proklamasi, 1 July 1971, proklamasi 14 Desember 1988 Negara Melanesia Barat, deklarasi 19 Oktober 2011, deklarasi 27 November, Papua New Guinea Congress 1997, Deklarasi WPNA 16 Agustus 2004, Deklarasi Parlemen Nasional West Papua 9 April 2012, deklarasi Saralana 6 Desember 2014.

Perdana Menteri, atas persetujuan Presiden Sementara dan koordinasi dengan Ketua West Papua Council

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Perdana Menteri tentang Pengangkatan dan Penetapan Gubernur Kepala Wilayah Pemerintahan dari West Papua Provisional Government.
Pertama	:	Mengangkat dan menetapkan Gubernur Kepala Pemerintahan Wilayah dengan nama Wilayah dan nama Gubernur sebagai berikut: 1. Gubernur Wilayah Mamta : Benny Yanteo 2. Gubernur Wilayah Saireri : Edison Kendi 3. Gubernur Wilayah Domberay : Markus Yenu 4. Gubernur Wilayah Anim-Ha : Mathias Tambaip 5. Gubernur Wilayah Bomberay : Erick Fimbay 6. Gubernur Wilayah La-Pago : Herman Kossay 7. Gubernur Wilayah Mee-Pago : Habel Nawipa
Kedua	:	Sebagai bagian Executive Council Wilayah, Gubernur diberikan wewenang dan kekuasaan atas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah sesuai Konstitusi dan bertanggung-jawab langsung kepada Perdana Menteri.
Ketiga	:	Surat keputusan ini dibuat untuk menyatakan keabsahan Wilayah Pemerintahan dan Gubernur di masing-masing Wilayah untuk dipergunakan dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah di wilayah dan daerah.
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Port Numbay, West Papua

Pada tanggal : 28 Oktober 2022

PERDANA MENTERI



REV. EDISON WAROMI, S.H



**PERDANA MENTERI
PEMERINTAH SEMENTARA
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA**

**PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
DAN PELANTIKAN KEPALA EKSEKUTIF WILAYAH**

BERITA ACARA

Nomor: 0001/PM/PROV-GOV/X/2022

Pada hari ini, 08.10... Tanggal. 28.. Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 10.00.. lewat 10.00.. waktu West Papua, yang bertanda tangan dibawah ini adalah Perdana Menteri Provisional Government of West Papua, telah:

Pertama memberikan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/PM/PROV-GOV/X/2022 kepada Gubernur Wilayah negara bagian Mamta, Saireri, Domberay, Bomberay, Anim-Ha, Lapago dan Mee-Pago sebagai kepala Pemerintahan Sementara di tingkat wilayah.

Kedua, melantik kepala Pemerintah Sementara *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* tingkat Wilayah sebagaimana termuat dalam lampiran ini sebagai Kepala Pemerintahan yang sah.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

PERDANA MENTERI




REV. EDISON WAROMI, S.H